

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

A. Kesimpulan

Dengan adanya aplikasi faktur pajak elektronik ini merupakan sebuah sarana yang dapat mempermudah PT Bukit Warna Abadi dalam pembuatan faktur pajak. PT Bukit Warna Abadi menerapkan aplikasi e-faktur pajak sejak Juli 2015, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa;

1. Penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak di PT Bukit Warna Abadi sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering dihadapi oleh PT Bukit Warna Abadi dalam menggunakan aplikasi e-faktur seperti adanya faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal, tetapi faktur pajak tersebut masih bisa diatasi, tetapi perlu perhatian yang lebih dalam pengecekan faktur pajak tersebut antara bagian akunting dan bagian pajak terhadap dokumen pendukung mulai dari surat jalan, NPWP lawan transaksi, nama lawan transaksi, harga barang, dan nama barang.
2. Dengan penerapan e-faktur dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ditahun 2018 telah diketahui pada bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November adanya SPT Pembetulan, SPT pembetulan bisa dilakukan dengan syarat PKP telah menyimpan data pendukung berupa alasan dan keterangan yang jelas, karena jika sewaktu-waktu Kantor Pajak melakukan pemeriksaan PT Bukit Warna Abadi dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya.
3. Mengenai pelaporannya SPT Masa PPN di PT Bukit Warna Abadi tetap mengikuti peraturan yang berlaku dengan menggunakan e-filing pada *DJP Online*.

B. Implikasi Manajerial

Berdasarkan Analisis Penerapan E-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT Bukit Warna Abadi), Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar penggunaan e-faktur, sebaiknya.

1. Bagi Pihak Perusahaan, untuk penerapan faktur memang sudah cukup, tetapi disarankan untuk penyetoran kurang bayar PPN sebaiknya 2 hari sebelum lapor, dan tidak terlalu diakhir bulan baru melaporkan SPT Masa PPN nya. dan juga masalah koneksi jaringan internet yang dapat mengakibatkan telatnya lapor pajak pertambahan nilai, PT Bukit Warna Abadi juga harus selalu *update* atau mengikuti dan mengetahui perkembangan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang setiap kali terdapat perubahan dalam sistem.
2. Bagi Pegawai Perusahaan, bagian yang menangani masalah perpajakan perusahaan hendaknya lebih teliti dalam proses pembuatan SPT Masa PPN dan juga harus aktif berkoordinasi dengan bagian terkait seperti bagian Keuangan dan bagian Akunting, hal ini sangat penting guna memperoleh data dan informasi dengan jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi pembayaran, pembelian, dan penjualan yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan pajak sehingga dapat menghindari terjadinya Pembetulan SPT Masa PPN yang dapat berisiko menimbulkan sanksi administrasi pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil beberapa perusahaan untuk diteliti agar memperkuat hasil penelitian.
4. Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak, Peneliti berharap pihak DJP dapat meng-*update* aplikasi e-faktur mengenai harus dapat mendeteksinya 10% PPN. dari angka DPP, serta permasalahan lain yang telah menjadi kendala bagi wajib pajak selama ini